



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Revitalisasi Monas Dihentikan

- Ketua DPRD DKI Sebut Ada Kejanggalan
- Mensesneg Dicecar Komisi II DPR

### Gambir, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, mulai Rabu (29/1) ini. Proyek senilai Rp 50 miliar itu dihentikan setelah Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat bersama dan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dengan DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, proyek dihentikan sampai pemerintah daerah mendapat rekomendasi dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka yang terdiri dari tujuh instansi.

Adapun Ketua Komisi Pengarah adalah Menteri

Sekretaris Negara dan Sekretaris Komisi Pengarah adalah Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan lima anggota komisi adalah Menteri Perhubungan; Menteri Lingkungan Hidup; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; serta Menteri Pariwisata.

"Kalau kami sebaiknya lebih suka diteruskan proyeknya. Tapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD DKI, kami hentikan dulu untuk menghormati (keputusan rapat)," ujar Saefullah di Monas Jakarta Pusat, Selasa, (28/1).

Saefullah mengatakan, atas keputusan itu maka dia akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Pasalnya, Satuan Perangkat

Kerja Daerah (SKPD) itu selaku kuasa pengguna anggaran sekaligus yang meneken kerja sama dengan PT Bahana Prima Nusantara selaku pelaksana proyek.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, proyek dihentikan sampai mendapat persetujuan dari Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka atau dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Mulai besok (Rabu, 29/1) dihentikan, sampai ada persetujuan dari Kemensetneg," kata Prasetyo.

### Minta diaudit

Prasetyo mengungkapkan, selain harus menunggu persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, proyek revitalisasi Monas dihentikan karena adanya kejanggalan. Dia meragukan, kegiatan revitalisasi sisi selatan dengan membuat membuat kolam dan plaza itu sampai menghabiskan dana sekitar Rp 50 miliar.

Pria yang akrab dipanggil Pras itu lalu meminta Inspektorat DKI Jakarta agar turun tangan dan mengaudit proses lelang proyek pengerjaan revitalisasi.

Bahkan saat sidak di lokasi pada Selasa (28/1), Prasetyo juga menemukan kesalahan teknis pengerjaan. Salah satunya yaitu lubang manhole yang berfungsi untuk membersihkan saluran air ketika tersumbat. Saat dicek, salurannya justru tidak ada.

"Itu gimana nanti air hujan mau ngalir kalau ditutup beton semua. Nah ada lubang, tapi mana salurannya? Gak beres semuanya ini," kata Pras.

Dikatakan Pras, dalam rapat koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI terkait revitalisasi Monas, kemarin, terungkap bahwa DKI belum mendapat persetujuan dari Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, bahwa pembangunan yang dilakukan DKI dalam hal ini sebagai Badan Pelaksana wajib mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Ketua Komisi Pengarah juga bertugas memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Merdeka yang disusun oleh Ketua Badan Pelaksana, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. "Disitu jelas harus ada persetujuan dari Ketua Komisi Pengarah dan ini belum ada persetujuannya," kata Prasetyo.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menyatakan bakal menyurati Pemerintah Provinsi DKI untuk meminta penghentian sementara revitalisasi kawasan Monas. Hal ini dilakukan karena revitalisasi tersebut belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk distop dulu," kata Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pratikno usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/1). "Kita

surati saja," sambungnya.

### Pertanyakan pengawasan

Selasa kemarin, Komisi II DPR RI juga menggelar rapat kerja bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung, serta Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa dan Arwani Thomafi.

Dalam rapat tersebut, Mensesneg Pratikno dicecar pertanyaan terkait proyek revitalisasi kawasan Monas yang dilakukan Pemrov DKI Jakarta.

Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P Endro S Yahman mempertanyakan pengawasan Mensesneg sehingga revitalisasi kawasan Monas menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

"Bagaimana Mensesneg melakukan tugas pengawasan revitalisasi Monas yang sekarang, ini jadi polemik, masalah di media masa dengan pennebanan pohonnya. Ini fungsi pengawasannya bagaimana?," kata Endro.

Senada dengan itu, anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang menilai Pemprov DKI Jakarta tidak patuh pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ia juga mempertanyakan apakah revitalisasi kawasan Monas sudah mendapat izin dari Mensesneg selaku ketua Komisi Pengarah.

"Ini sudah tidak patuh Kepres no 25 tahun 1995. Bagaimana sikap setneg?"

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Revitalisasi Monas Dihentikan

Bagaimana hidupnya pohon 190 itu? Itu kan mestinya kita pelihara tapi ditebang oleh gubernur. Ini bagaimana? Apakah penebangan tersebut sudah izin dan mendapat izin? Dari komisi pengarah? Jangan dibiarkan pak. Ini kejahatan lingkungan pak, kejahatan penghijauan," ujar Junimart.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mempertanyakan koordinasi Kemensetneg dan Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, proyek revitalisasi kawasan Monas tidak akan terjadi tumpang tindih jika Kemensetneg dan Pemprov DKI saling berkoordinasi.

"Idealnya dari awal ada koordinasi yang lebih baik ya, sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari, apalagi sampai Kemensetneg berkirin surat dan meminta ada pemberhentian proyek itu," kata Arwani.

### Empat gubernur

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, revitalisasi Monas sudah dilakukan oleh empat gubernur. Namun, baru kali ini revitalisasi tersebut dilakukan tanpa izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi sudah dilakukan. Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu (izin Komisi Pengarah)," ujar Basuki usai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1).

"Berarti, tiga gubernur sebelumnya juga sudah mengikuti prosedur. Seharusnya (Gubernur Anies) mengikuti prosedur yang sudah ada," tambah Basuki. (faf/Kompas.com)